

Publikasi #2019
Ikatan Sosiologi Indonesia



Memahami Kembali Indonesia

Penyunting: Akhmad Ramdhon

Memahami Kembali Indonesia

© Penulis

Penyunting: Akhmad Ramdhon

Reviewer:

Akhmad Ramdhon,
Argyo Demartoto,
Siti Zunariyah,
Yulius Slamet

Foto Sampul: Edi Wibowo

Perancang Sampul: Aryo Prakosa

Penata Letak: Mapa

Diterbitkan atas kerjasama:

Ikatan Sosiologi Indonesia,
Lab-Sosio Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret

dengan:

Buku Litera Yogyakarta
Minggiran MJ II/1378, RT 63/17
Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta
Telp. 0274-388895, 08179407446
bukulitera@gmail.com, matapadi_media@yahoo.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama, Oktober 2013

xvi+ 952 hlm.; 15.5 x 23.5 cm

ISBN: 978-602-7636-46-0

Dicetak Oleh:

Mata Padi Pressindo
Telp. 0274-388895
08179407446, 081227837806
bukulitera@gmail.com

Daftar Isi

Pengantar	v
Daftar Isi	ix

Bagian Satu Tradisi dan Perubahan Sosial

Ahmad Zuber Konflik Agraria Di Masyarakat Pedesaan: Kasus Di Desa Sanggang	3
Akhmad Ramdhon Para <i>Penghulu</i> Kauman: Transformasi Dan Formalisasi Tradisi Kampung Kauman Surakarta	15
Andi Burhanudin, Rasyidah Zainuddin Institusionalisasi Modal Sosial Di Era Modern Mempertimbangkan Eksistensi Komunitas Khusus	36
Djaja Hendra "Jebakan" Keistimewaan DIY: Perspektif Sosiologi Agraria	47
Eymal B. Demmallino, M. Saleh S. Ali, Abd. Qadir Gassing & Mungsi Lampe Kapitalisme dan Perilaku Ekonomi Masyarakat Maritim: Studi Kasus pada Komunitas Pasompe' Di Negeri Bugis Makassar Sulawesi Selatan	66
Ikma Citra Ranteallo, Nazrina Zuryani & Dinny Jusuf Tenun Toraja: Karya Tangan Berbasis Tradisi Menuju Pasar Global	87

M. Nurun Najib Konstruksi Identitas Keagamaan: Studi Tentang Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Dengan Masyarakat Lokal	102
Muhammad Masdar Urgensi "Trust" Dalam Masyarakat Multietnik: Studi Interaksi Antar Etnik di Wonomulyo Kabupaten Polman Sulawesi Selatan	132
Sigit Pranawa Rasionalitas Perajin Untuk Mempertahankan Kelangsungan Usaha: Studi Di Sentra Kerajinan Perak Kotagede	151
Trisni Utami Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional Melalui Revitalisasi Kelembagaan	169

Bagian Dua Lingkungan dan Pemberdayaan

Andi Tenri Ramai-Ramai Melawan Negara: Dramaturgi Sehari-hari Dibalik Interaksi Pengelolaan Hutan	187
Ary Wahyono Community Based Co-Management: Perspektif Sebagai Solusi Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	205
Edi Susilo Adaptor Sosial: Dari Konsep Ke Beberapa Pengalaman Aplikasi	218
Jefta Leibo, Sri Yuliani & Rahesli Humsona Gender Dalam Mitigasi Bencana: Studi Di Kabupaten Karanganyar	234
Nana Haryanti Reformasi Sektor Kehutanan: Tantangan Pada Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	254

Rachmad K Dwi Susilo Pengembangan Model Co-Mamangement Berbasis Pembelajaran Sosial Untuk Pencegahan Konflik Pengelolaan Sumber Daya Air Minum Bagi Masyarakat Sekitar Sumber Air Di Kota Batu	271
Siti Zunariyah Partisipasi Masyarakat Dalam Program Perhutanan Sosial Di Yogyakarta	300
Sulistyaningsih Dinamika Sosial Politik Sertifikasi Hutan Rakyat Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta	321

Bagian Tiga

Perempuan, Anak dan Perlindungan

Ambar Sari Dewi Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Oleh Perempuan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah di Jawa Tengah dan Yogyakarta	341
Aniek Rahmaniah Perempuan Dan Politik Pada Era Otonomi Daerah	361
Dadang Hikmah Purnama Kekerasan Terhadap Anak Perempuan Di Palembang	381
Diana T Cahyaningsih, Eva Agustinawati & Sumardiyono Strategi Perlindungan Bagi Pekerja Terburuk Anak Menuju Kota Layak Anak Di Surakarta	398
Keppi Sukesi, Yeni Puspita Sari Migrasi Internasional Dan Pengaruhnya Terhadap Kebahagiaan Perempuan Buruh Migran dan Rumah Tangganya	412
Kustini Perkawinan Dibawah Umur: Pupusnya Masa Depan Perempuan Di Cianjur	419

Nazrina Zuryani, Ni Luh Nyoman Kebayantini Caleg, Tim-Sel KPU dan Wareg: Renungan Keterwakilan Perempuan di Bali	444
Rahesli Humsona Mengembangkan Relasi Seksual Yang Sehat Melalui Pemberdayaan Anak Yang Dilacurkan (Ayla) Di Kota Surakarta	460
Sitti Bulkis, Nursini, A. Nixia Tenriawaru & Rahmadanih Model Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Miskin Berspektif Gender Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Soppeng dan Bone	479
Vinita Susanti Kajian Sosiologis Terhadap Perempuan Pembunuh	493
Widjajanti M Santoso Revitalisasi PKK: Memikirkan Kontribusi Sosiologis Dalam Konteks Ketahanan Keluarga	518

Bagian Empat **Pendidikan dan Karakter Moral**

Atik Catur Budiati, Siany Indria Liestyasari Reproduksi Kekerasan di Kalangan Siswa SD dan Implikasinya Bagi Pendidikan Berkarakter Di Kota Surakarta	543
Bagus Haryono, Edy Tri Sulistyono & Ahmad Zuber Pengembangan Model Pendidikan Empat Pilar Bangsa Pada Masyarakat Akar Rumput Menuju Terwujudnya Integrasi Nasional di Kota Surakarta	562
Bastiana Interaksi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi	586

Hartati Sulisty Rini Implementasi Pendidikan Multikultural Sebagai Modal Sosial Dalam Kehidupan Berbangsa	602
Sri Hilmi Pujihartati, Bambang Wiratsasongko & Argyo Demartoto Standar Pendidik Sebagai Salah Satu Syarat Keberhasilan Pelaksanaan Program PAUD Dalam Membentuk Karakter Anak	620

Bagian Lima Modal Sosial

Arianti Ina Restiani Hunga Modal Sosial Dalam Industri Berbasis "Putting-Out" System Studi Kasus Cluster Batik di Sragen & Surakarta.....	639
Arie Wahyu Prananta, Sabarudin Ahmad, Mualim & Zainal Abidin Industrial Impact Analysis In The Industry Gresik, East Kalimantan and Bali, Using Structural Equation Modeling, Social And Mapping "Post Industrial Society To Economy Consumptive"	679
Erik Aditia Ismaya Falsafah Gusjigang Sebagai Modal Sosial Membangun Masyarakat Kudus yang Sejahtera	704
Ferdinand Kerebungu Pemberdayaan Masyarakat Di Obyek Wisata Pantai Malalayang Dua Manado	720
Indah Meitasari Dukungan Modal Sosial Dalam Implementasi Program Jaminan Persalinan Di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat	739
Rosmawaty Jaringan Sosial Sebagai Strategi Adaptasi Pada Janda Korban Konflik Di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah	762

Syamsu A. Kamaruddin
Revitalisasi Modal Sosial Pada Masyarakat Transisi772

Bagian Enam
Teori dan Kompleksitas Modernitas

T. R. Andi Lolo, Bastiana
Restrukturisasi Dan Reorientasi Pendidikan Sosiologi
Di Indonesia785

**Argyo Demartoto, Endang Gerilyawati IES
& D Priyo Sudibyo**
Seksualitas Masyarakat Berisiko: Studi Kasus
Pada Laki-Laki Yang Berhubungan Seks Dengan Laki-Laki
Di Surakarta802

Bambang K. Prihandono
Neuro-Sosiologi: Memahami Nalar Modal Sosial
Dan InovasiPenjelajahan Awal Tentang Konsep
Neuro-Sosiologi Dan Relevansinya Dengan Pembangunan
Modal Sosial di Indonesia822

Craig Cook
The Social Construction Of Bodies Through Basketball
During The American Occupation Of The Philippines
1906-1922838

Fajar Junaedi, Akhmad Ramdhon
Fanatisme Berujung Konflik: Potret Identitas Anak Muda
Urban Penggemar Bola865

Hamzah Fansuri
Kontribusi Keilmuan Sosiologi di Era Pasca-Ruang883

Siti Amanah, Dien Vidia Rosa & Hery Prasetyo
Pasca Bencana Dan Ketakterhentiannya: Studi Tentang
Kultur Resiko Dalam Keseharian Yang Traumatis899

M. Ridhah Taqwa
Politik Citra Dan Implikasinya Pada Pemilihan Umum Era
Reformasi: Perspektif Sosiologi Kekuasaan 919

Sri Murlianti
Tranformasi Kultural Elemen-Elemen Budaya Disiplin Klinis
Ke Dalam Praktik Jasa Perawatan Kecantikan932

Dinamika Sosial Politik Sertifikasi Hutan Rakyat Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta

Sulistyaningsih

sulistyaningsih76@gmail.com
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Pendahuluan

Proses sertifikasi hutan rakyat yang telah diinisiasikan oleh dua NGO yaitu Lembaga ARUPA Yogyakarta dan Yayasan Shorea Yogyakarta serta Pusat Studi Kajian Hutan Rakyat (PKHR) UGM sejak tahun 2004 telah menunjukkan hasilnya secara signifikan. Proses yang intensif dalam pendampingan tiga unit manajemen hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta¹ telah menuai hasilnya. Ketiga unit manajemen hutan rakyat tersebut mendapatkan Sertifikasi dari PT TUV Rhullean pada tanggal 20 September 2006 melalui Koperasi Wana Manunggal Lestari. Proses panjang yang dilalui sampai mendapatkan sertifikasi hutan rakyat di kabupaten Gunung Kidul ini tentu saja mempunyai dinamika sosial politik yang bisa dicermati dalam keberlanjutan program ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, tulisan ini bertujuan untuk menjawab persoalan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana dinamika sosial politik sertifikasi hutan rakyat di kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta? *Kedua*, bagaimana dinamika sosial politik sertifikasi hutan rakyat di kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta?

¹ Tiga unit manajemen hutan rakyat berada di wilayah kelola di Desa Giri Sekar Kecamatan Panggang, Di Desa Dengok, Kecamatan Playen dan Desa Kedungkeris di Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul.

Metode

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dipergunakan dengan pertimbangan akan lebih mudah apabila dalam penelitian berhadapan dengan suatu kenyataan baru atau kenyataan ganda di lapangan (Moleong, 1993: 26). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Hal ini karena terkait dengan cara-cara anggota masyarakat menyusun dan membentuk ulang alam kehidupan sehari-hari. Menurut Alfred Schutz (2009: 337) pendekatan fenomenologi ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menafsirkan tindakan dan pemikiran manusia dengan cara menggambarkan struktur-struktur dasar, realita yang tampak nyata di mata setiap orang yang berpegangan teguh pada sikap alamiah.

Lokasi penelitian mengambil tempat di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta karena di Kabupaten Gunung Kidul ini sudah ada hutan rakyat yang telah tersertifikasi sejak tahun 2006. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel bertujuan (*purposive sample*) (Moleong, 1993: 166). Sampel dalam penelitian ini adalah anggota dan pengurus yang terlibat Kelompok petani Hutan Rakyat di Gunung Kidul, Perwakilan dari pemerintah daerah Gunung Kidul, Dinas Kehutanan, PKHR UGM, NGO (AR^oPA) .

Data yang dijadikan bahan analisis ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*depth interview*). Penggalan data sekunder diperoleh dari pustaka-pustaka atau literatur, laporan, jurnal, artikel, internet serta dokumen-dokumen yang menunjang dalam penelitian ini .

Data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif pula, secara *on going process*, sebab analisa data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus (Huberman, 1993: 20). Proses analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data dari berbagai sumber, mengadakan reduksi data dan penafisan data. (Moleong, 1993: 198)

Ekonomi Politik dan Teori Sistem Dunia: Sebuah Tinjauan teoritik

Dalam teori ekonomi politik sertifikasi hutan rakyat ini lebih banyak menyoroti bagaimana peran negara, pasar dan kelembagaan hutan rakyat dalam sertifikasi hutan rakyat. Pengelolaan hutan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar atas produk-produk hutan dan mendorong implementasi pengelolaan hutan lestari membutuhkan dukungan sertifikasi². Pelaksanaan sertifikasi dilakukan oleh pihak ketiga yang independen (Info LEI, 2002). Kebutuhan sertifikasi sebagai pendorong pengelolaan hutan secara lestari merupakan hal yang tidak dapat ditunda lagi. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti : adanya keprihatinan dari berbagai pihak atas laju deforestasi yang semakin meningkat, kebutuhan kayu dunia yang semakin meningkat dan tuntutan ekspor kayu ramah lingkungan bagi pasar internasional terutama Eropa dan Amerika Utara.

Adanya sertifikasi hutan rakyat ini pula negara harusnya juga serius melakukan intervensi dalam pasar, artinya negara harus memberikan proteksi atau perlindungan bagi pasar hutan rakyat yang sudah memasuki pasar global. Salah satu alat (*tools*) yang digunakan untuk mengembangkan unit manajemen hutan rakyat agar bisa memberikan kelestarian produksi, ekologi, dan ekonomi, adalah sistem sertifikasi ecolabel.

Inti dari teori sistem dunia yang digagas oleh Immanuel Wallerstein (Ikbar, 2006: 23) adalah bahwa ekonomi modern dan hubungan politik diyakini berbeda dengan pendahulu pra modern. Dunia (*world*) adalah merupakan keseluruhan dari struktur sistem dan merupakan sebuah tingkatan analisis yang tepat.

Dalam konteks ini kita bisa melihat bagaimana pasar lokal berhadapan dengan pasar global (pasar bebas). Pasar global identik dengan globalisasi. Berbicara tentang dinamika produksi dan pemasaran hutan rakyat di Gunung Kidul dapat ditemukan

² Sertifikasi hutan rakyat bisa didefinisikan sebagai prosedur verifikasi yang ditetapkan dan dikenal yang menghasilkan sertifikat mengenai kualitas pengelolaan hutan dengan hubungannya dengan satu set kriteria dan indikator.

fakta bahwa sebelum ada sertifikasi hutan rakyat, masyarakat atau petani hutan rakyat dalam pemasaran produk-produk hutannya dilakukan secara tradisonal³. Namun, ketika ada gagasan sertifikasi hutan rakyat yang sudah tersertifikasi, masyarakat sekarang sudah tidak bisa melakukan tebang hutan berdasarkan kebutuhan mereka. Penebangan kayu dilakukan berdasarkan pada permintaan pasar. Adapun wadah yang menjadi media untuk bertinteraksi dengan pasar global adalah Koperasi Wana Manunggal Mandiri Kabupaten Gunung Kidul.

Dinamika Sosial Politik Pra Sertifikasi Hutan Rakyat di Kabupaten Gunung Kidul

Pada sub bagian ini akan dibahas mengenai dinamika sosial politik pengelolaan hutan rakyat 3 Desa di 3 Kecamatan Pra Sertifikasi Hutan rakyat.

Dinamika Sosial Politik Pengelolaan Hutan rakyat di Desa Giri Sekar Kecamatan Panggang

Pengelolaan hutan rakyat di Girisekar ditandai dengan belum adanya kelembagaan hutan rakyat yang secara serius memberikan perhatian kepada keberadaan hutan rakyat⁴. Kelembagaan yang ada di Desa Girisekar adalah kelompok tani untuk kegiatan *on farming* (pertanian). Kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap pengelolaan hutan rakyat yang ada. Secara institusional, para petani hutan rakyat tidak mempunyai wadah untuk meningkatkan posisi tawar kepada berbagai pihak. Di sisi lain, secara teknis pengelolaan hutan rakyatpun hanya mendasarkan pada tradisi yang diwariskan oleh para pendahulunya. Hal ini bisa dilihat pada tradisi yang dilakukan oleh para petani hutan rakyat di Desa Giri Sekar. Para

³ Hal ini nampak, ketika masyarakat merasa butuh uang, maka mereka akan segera menebang kayu-kayu dari hutan, terutama jati. Mereka melakukan penebangan berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan pada tebang pilih sebagai investasi jangka panjang. Memang ketika masyarakat misal melakukan penebangan 1 pohon, mereka akan menanam 10 pohon jati. masyarakat satu sisi sudah memikirkan jaminan keamanan menanam (*security assurance*) bagi investasi mereka. Dalam melakukan pemasaran produk-produk kayu itu biasanya mereka langsung menawarkan kepada pembeli atau lewat perantara.

⁴ Data base ARUPA, 2006

petani hutan rakyat banyak menanam tanaman kehutanan seperti jati lokal⁵, mahoni dan akasia. Tanaman jati menjadi tanaman dominan. Para petani yang tidak memiliki lahan luas biasanya menanam jati secara acak tanpa mengenal jarak tanam. Hal ini berbeda dengan para petani yang memiliki lahan luas, mereka sudah menerapkan model tanam secara modern (mengenal jarak tanam). Tanaman jati banyak ditanam di lereng-lereng bukit dan bagian tepi lahan garapan (galeng/teras). Jika ada biji jati tumbuh ditengah-tengah bidang olah, biasanya akan dipindah ke tempat yang sekiranya tidak mengganggu tanaman pertanian⁶. Tradisi ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai bagian dari *local wisdom* yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Girisekar.

Mekanisme pengaturan hasil dalam pengelolaan hutan rakyat di Giri Sekar lebih banyak dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya di tingkat keluarga⁷. Dalam konteks ini belum ada optimalisasi hasil panen dari keberadaan hutan rakyat. Hasil panen dari pengelolaan hutan rakyat di Desa Girisekar lebih banyak untuk kebutuhan *subsistensi* (bangunan, kayu bakar dan sebagainya). Para petani hutan rakyat belum mempunyai gagasan yang berorientasi pada profit dan profesionalitas. Adanya *mindset* seperti ini menimbulkan fenomena tebang butuh⁸. Meskipun demikian para petani di Desa Girisekar ternyata juga melakukan tebang pantas⁹. Ini artinya, masyarakat sebenarnya mempunyai *consciousness of future security* bagi anak cucunya.

Berbicara tentang mekanisme jalur perdagangan kayu hutan rakyat di Desa Girisekar dilakukan melalui jalur atau mata rantai yang sederhana. Ada dua jalur perdagangan kayu produk hutan

⁵ Bibit tanaman jati awalnya diperoleh dari hutan yang dikelola oleh dinas kehutanan kabupaten Gunung Kidul. Setelah tanaman tumbuh besar dan mampu menghasilkan biji, tanaman jati didapat dengan cara memindahkan semai (tukulan) yang banyak tumbuh di tegal mereka.

⁶ Data base ARUPA, 2006

⁷ Data Base ARUPA, 2006

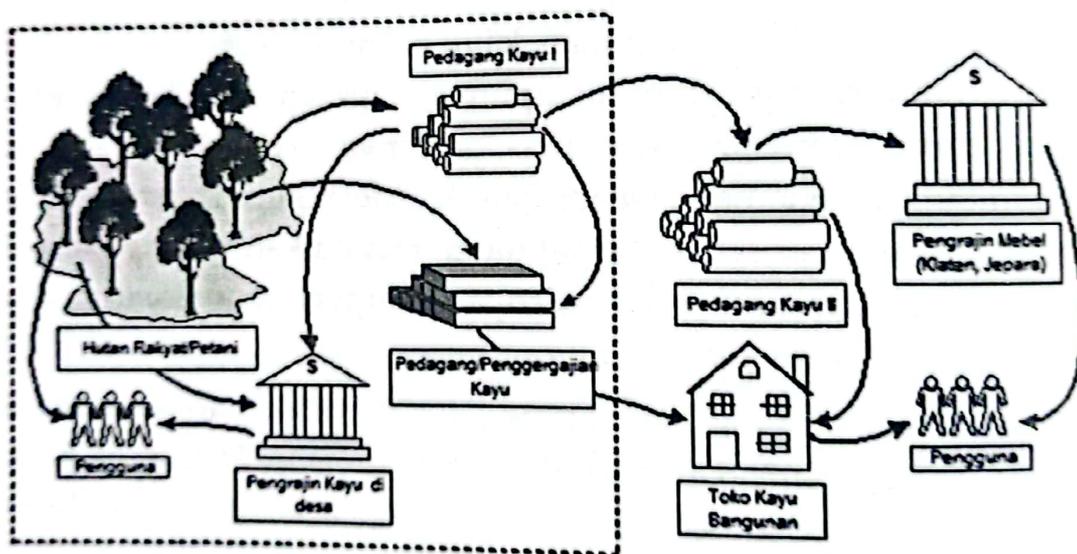
⁸ Tebang butuh artinya menebang pohon jati sesuai dengan tingkat kebutuhan suatu keluarga misalnya : ketika punya hajat, ada keluarga yang sakit, biaya sekolah, membangun atau memperbaiki rumah dsb

⁹ Penebangan pohon juga berdasar pada ukuran diameter pohon yaitu pohon-pohon yang telah berumur diatas 15 tahun dengan keliling diatas 60 cm

rakyat di Desa Girisekar yaitu¹⁰:

1. Kayu dari hutan rakyat/petani terdistribusi di dalam desa dan keluar desa. Distribusi di dalam desa terbagi melalui dua jalur yaitu (1) dari petani langsung ke pemakai atau pengrajin, dan (2) dari petani dibeli oleh penebas (pengumpul kayu) kemudian dibeli oleh pengrajin atau pedagang/penggergajian.
2. Jalur pemasaran ke keluar desa melibatkan banyak pelaku. Baik jalur ke luar desa maupun di dalam desa yang tidak langsung ke pemakai selalu melalui penebas. Penebas adalah orang-orang yang berasal dari dalam desa yang umumnya adalah pemilik modal dan hampir selalu ada di setiap dusun. Penebas ini melakukan usahanya hanya berdasar pesanan dan hanya beberapa penebas saja yang bekerja secara rutin, tidak tergantung pesanan.

Secara detail untuk alur bisa dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 01. Jalur Perdagangan Kayu Hutan Rakyat Giri Sekar

Sumber: Data base ARUPA, 2006

Dinamika Sosial Politik Pengelolaan Hutan Rakyat di Desa
Dengok Kecamatan Playen

Pengelolaan hutan rakyat di suatu daerah mempunyai

¹⁰ Sumber: Data base ARUPA, 2006

perbedaan. Hal ini disebabkan terkait dengan dinamika sosial politik yang terjadi. Namun demikian, ada dua hal yang melekat dan organisasi pelaksana yaitu kawasan yang dikelola¹¹ rakyat. Fenomena yang dihadapi dalam pengelolaan hutan pra sertifikasi di Desa Dengok adalah belum adanya kelembagaan kelompok tani untuk kegiatan *on farming* (pertanian). Para petani di Desa Dengok, juga mengandalkan tradisi para pendahulunya dalam pengelolaan hutan rakyat, seperti dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengaturan hasil.

Kegiatan penanaman hutan rakyat dilakukan dengan cara mengambil/memindahkan semai (*thukulan*) yang ada di bawah tegakan Jati yang sudah berbuah¹² dan ada juga yang membeli bibit dari pasar. Penanaman dilakukan pada batas-batas lahan milik. Para petani menanam tanaman kehutanan seperti tanaman Jati, akasia, mahoni, sonokeling serta tanaman buah-buahan yang ditanam pada pekarangan dan kebun. Pemeliharaan dilakukan secara tradisional yaitu melalui penjarangan. Pemanenan hasil tanaman kehutanan berdasarkan pada tebang butuh dan tebang pilih. Ini artinya, mekanisme pemanenan belum dioptimalkan hasilnya untuk orientasi profit. Untuk mekanisme pengaturan hasil hutan rakyat masih bersifat individual/dalam lingkup keluarga¹³.

Dinamika Sosial Politik Pengelolaan Hutan rakyat di Desa Kedung Keris Kecamatan Nglipar

Pengelolaan hutan rakyat di Desa Kedung Keris kecamatan Nglipar pra sertifikasi dilakukan secara tradisional berdasarkan *stock of knowledge* masyarakat. Kelompok tani hutan rakyat yang ada di Desa Kedung Keris ada karena inisiatif Joyo Sumarto (dukuh saat itu) dibangunlah Kelompok Tani Penghijauan dengan

¹¹ Pengelolaan kawasan hutan rakyat meliputi kegiatan teknis kehutanan seperti penanaman, pemeliharaan, pemanenan serta pengaturan hasil

¹² Para petani biasanya memperoleh bibit dari tegalan/kawasan yang sudah bagus tanaman Jatinya

¹³ Data base Yayasan Shorea, tahun 2006

nama Sumber rejeki. Pada tanggal 9 April 1987 berubah nama menjadi Kelompok Tani Hutan Rakyat Swadaya Sumber Rejeki dengan anggota pada awalnya 27 orang Sedangkan untuk Kedung Keris merupakan dampak dari Pringsurat, demikian pula dengan Sendowo Kidul. Keberadaan kelompok tani hutan rakyat ini menjadi point penting dalam pengelolaan hutan rakyat. Kelompok tani ini telah memiliki daftar anggota berdasarkan kepemilikan lahan baik menurut bukti-buktinya¹⁴ ataupun menurut kepemilikan kayu maupun berdasarkan pemanfaatan lahan dan Tata Guna Lahan.

Pengelolaan Hutan Rakyat di wilayah Desa Kedung Keris dengan model Tumpangsari secara intensif dan melaksanakan aspek-aspek kegiatan pengelolaan hutan¹⁵. Penanaman biasanya dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Mekanisme kerja kelompok ini merupakan strategi masyarakat untuk mengatasi masalah keterbatasan tenaga kerja. Kegiatan penanaman tanaman kayu dilakukan bersamaan dengan penanaman tanaman pertanian, seperti jagung, kacang dan ketela pohon. Pemeliharaan tanaman pertanian meliputi perbaikan teras dan SPA/SPAT (perbaikan lalahan), pendangiran tanah, penyulaman tanaman¹⁶. Pemeliharaan yang dilakukan untuk tanam kayu (jati) melalui penjarangan¹⁷. Kegiatan pemanenan dilakukan berdasarkan tebang butuh¹⁸ dan para petani wajib menanam kayu jati lagi dalam menjaga kelestarian produksi dan ekologi. Dalam konteks ini, para petani

¹⁴ Sebagian besar bukti kepemilikan lahan berupa Model D (Letter D), dibanding dengan jumlah status lahan yang bersertifikat.

¹⁵ Aspek-aspek pengelolaan hutan meliputi: penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengaturan hasil dan pemasaran hasil hutan

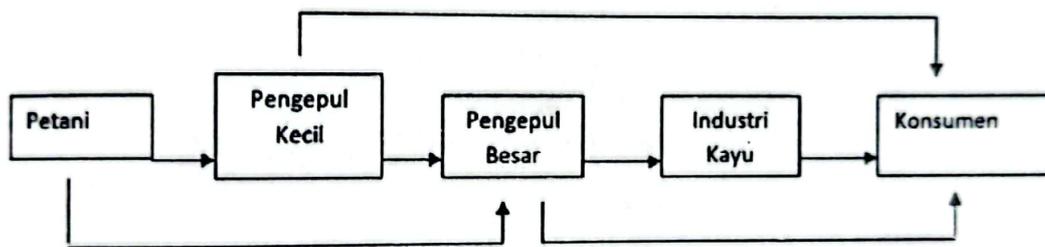
¹⁶ Data base PKHR UGM, tahun 2006

¹⁷ Penjarangan ditujukan untuk memberikan ruang tumbuh yang cukup bagi pohon-pohon yang memiliki kenampakan fisik yang lebih baik

¹⁸ Para petani hutan rakyat memanen kayunya ketika ada kebutuhan hajatan dan sebagainya. Petani memilih kayu yang pendidikan anak, biaya yang sudah cukup umur, dan siap diserap pasar. Petani menjual kayu kepada pengumpul dalam keadaan kayu berdiri, dan sistem tebang yang digunakan adalah tebang pilih. Sistem ini didasari, dan sistem tebang yang minimal yang boleh dipanen, sehingga didasarkan pada umur tanaman bernilai tinggi. Berdasarkan kesepakatan masyarakat memiliki mutu yang baik dan ditebang pada saat minimal umur 15 tahun, mahoni berumur minimal 15 tahun, akasia berumur minimal 10 tahun, dan campuran minimal 10 tahun.

memiliki *local wisdom* yaitu menebang 1 pohon wajib menanam 10 pohon. Penebangan kayu jati dilakukan oleh pembeli, baik secara manual maupun dengan menggunakan gergaji tangan dan gergaji mesin (*chainsaw*). Pengelolaan hutan rakyat yang bersifat non kayu, dilakukan dengan penanaman dan budidaya palawija dan empon-empon. Petani biasanya menjual hasil panen palawija (kacang dalam bentuk basah, kedelai dalam bentuk kering dan jagung dalam bentuk kering). Untuk ketela pohon diolah menjadi gaplek¹⁹.

Pemasaran produk hutan rakyat di Desa Kedung Keris dilakukan dalam dua bentuk, yaitu batang/log dan dalam bentuk olahan²⁰. Daerah pemasaran produk kayu hutan rakyat menjangkau berbagai wilayah seperti Klaten, Jepara, Pekalongan, Tegal, Brebes, Solo dan Bandung²¹. Adapun model pemasaran kayu hutan rakyat di Desa Kedung Keris secara detail adalah sebagai berikut: dari ped



Sumber: Data base PKHR UGM tahun 2006

Dinamika Sosial Politik Setelah Sertifikasi Hutan Rakyat di Kabupaten Gunung Kidul

Sertifikasi hutan rakyat di kabupaten Gunung Kidul diberikan melalui Koperasi Wana Manunggal Lestari pada bulan November 2006. Adanya sertifikasi hutan rakyat ini telah melahirkan dinamika yang ada dalam kehidupan masyarakat di 3 kecamatan (kecamatan Panggang, Playen dan Nglipar) Kabupaten Gunung Kidul.

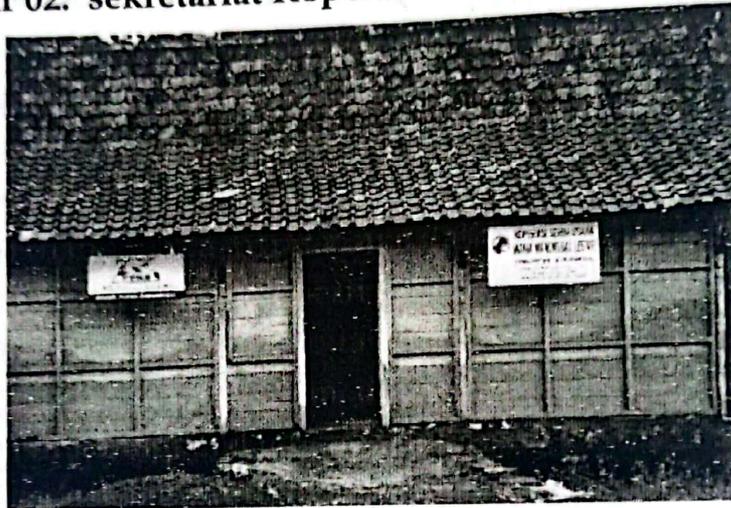
¹⁹ Data base PKHR UGM, tahun 2006

²⁰ Pada bentuk log biasa dilakukan pada saat kebutuhan mendesak dan butuh dalam waktu cepat. Sedangkan untuk produk olahan, dijadikan sebagai nilai tambah dari kayu itu sendiri, misal handycraft, meubel, dan hasil pertukangan lainnya.

²¹ Data base PKHR UGM tahun 2006

Menurut penuturan informan, ada perubahan yang bisa dirasakan pasca sertifikasi seperti adanya kelembagaan hutan rakyat baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten yang direpresentasikan oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari. Selain itu adanya *transfer of knowledge* dari pendamping lapangan (LSM) kepada masyarakat terkait pentingnya sertifikasi, pentingnya kemampuan manajemen hutan rakyat, Gunung Kidul menjadi salah satu Pilot Project untuk Sertifikasi Hutan rakyat di Indonesia yang bisa menjadi salah satu *trend setter*.

Gambar 02. sekretariat Koperasi Wana Manunggal Lestari



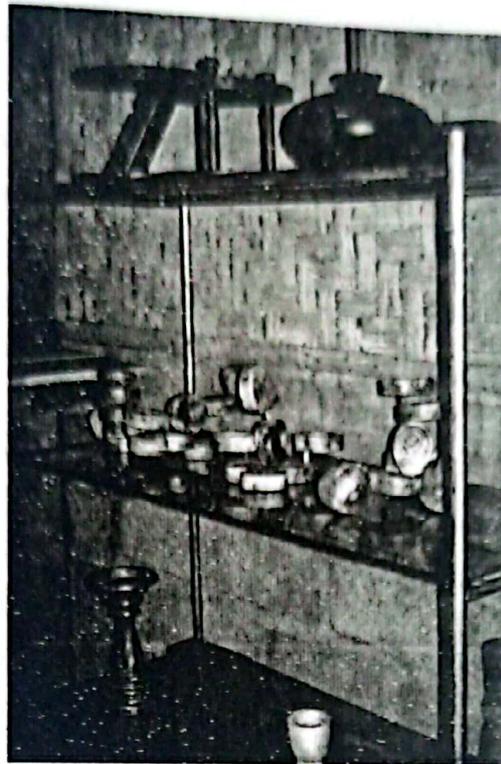
Sumber: Sulistyaningsih, Maret 2012

Gambar 03. produk-produk kayu yang dibuat oleh Koperasi Wana manunggal Lestari



Sumber: Sulistyaningsih, Maret 2012

Gambar 04. Produk sample dari Koperasi Wana Manunggal Lestari



Sumber: Sulistyaningsih, Maret 2012

Namun di balik, capaian yang diperoleh dalam kurun waktu 2006 - 2012 oleh petani hutan rakyat di kabupaten Gunung Kidul tersebut, ternyata, para petani hutan rakyat di tiga desa dihadapkan kepada berbagai persoalan seperti pemasaran produk kayu hasil sertifikasi, persoalan yang dihadapi oleh Koperasi Wana Manunggal Mandiri, kekompakan dalam kelompok tani di masing-masing unit management hutan rakyat serta adanya persoalan klasik yang ada di masyarakat Gunung Kidul yaitu adanya fenomena tebang butuh pasca sertifikasi. Selain itu belum teroptimalkannya dukungan kebijakan dari pemerintah kabupaten Gunung Kidul. Beberapa persoalan tersebut bisa dideskripsikan secara jelas sebagai berikut:

1. Persoalan terkait dengan pemasaran produk hutan rakyat

Pemasaran menjadi salah satu faktor penting dalam sertifikasi hutan rakyat. Setelah adanya sertifikasi hutan rakyat, masyarakat di kabupaten Gunung Kidul berharap akan ada nilai lebih (*added value*) secara ekonomi dari penjualan produk-

produk kayu yang tersertifikasi. Masyarakat berharap dengan adanya sertifikasi hutan rakyat, produk-produk kayu yang telah bersertifikat tersebut laku di pasaran internasional seperti di Eropa dan Amerika.

Tetapi, faktanya hal tersebut tidak terjadi. Adanya persoalan pemasaran ini disebabkan oleh faktor yang kompleks, seperti standar sertifikasi yang dikeluarkan dengan skema LEI tidak bisa diterima oleh pasaran internasional. Standar ini berbeda dengan standar yang diterapkan oleh FSC. Dalam konteks perspektif ekonomi politik, adanya sertifikasi hutan rakyat ini negara harusnya serius melakukan intervensi dalam pasar, artinya negara harus memberikan proteksi atau perlindungan bagi pasar hutan rakyat yang sudah memasuki pasar internasional. Bila dilihat dari perspektif teori sistem dunia yang menyebutkan bahwa dunia (*world*) adalah merupakan keseluruhan dari struktur sistem dan merupakan sebuah tingkatan analisis yang tepat. Dalam konteks ini kita bisa melihat bagaimana pasar lokal berhadapan dengan pasar global (pasar bebas). Ternyata, dalam hal ini, produk-produk yang telah tersertifikasi belum bisa sepenuhnya siap berhadapan dengan pasar global secara maksimal. Persolan pemasaran juga disebabkan karena faktor internal di masyarakat seperti yang dituturkan oleh informan Bapak Sgn²² berikut:

“selama ini kita belum bisa istilaha memfokuskan prodak itu karena banyaknya kendala kendala, yang jelas itu SDMnya skill nya yang belum mampu membuat prodak prodak yang khususnya yang laku di pasaran luas, misalnya di pasaran luar negeri dari segi lain dari segi aturan main atau mungkin perundang undangan jadi kitakan setelah adanya sertifikasi ini kita bisa tahu tentang undang undang bagaimana cara penembanganya bagaimana cara penjualannya. kalau dampak ekonomi belum begitu terasa karena kita ya masih seperti inilah keadaanya belum ada peningkatan yang lebih, itukan tujuan kita untuk mengadakan dengan adanya sertifikasi inikan kita di harapkan ya bisa mengangkat ekonomi rakyat tapi sampai saat ini itu belum begitu terasa “

²² Wawancara dengan bapak Sgn, bulan Juni 2012

2. Persoalan terkait dengan Kemandirian Koperasi Wana Manunggal Lestari

Persoalan dalam Koperasai Wana manunggal Lestari adalah terkait dengan persoalan internal kepengurusan. Pengurus yang ada belum mempunyai kemampuan menejerial yang profesional. Selain itu juga pengurus yang tidak aspiratif dan akomodatif terhadap aspirasi anggota. Ini seperti yang diturkan oleh informan EN²³:

“memang, memang belum ini, koprasinya malah, e pengurusnya masih mengelola dengan management tradisional, itu, kemudian mereka juga tidak siap dengan managemen usaha yang memang bener-bener profesional, nah selama empat tahun ini adalah kendalanya memang di pengurus, dia masih mengelola secara tradisional. tradisionalnya adalah pengurus masih mengurus bisnis, padahal di koprasi yang benar itu pengurus itu harus punya manager bukan mengurus bisnis, nah kemarin kita coba, duaribu berapa,, 2006 2008 itu managernya suryo ternyata ruang untuk suryo sendiri tidak di berikan secara porposional oleh pengurus, dengan ini ketua, justru yang menjadi otoritas manager itu di pegang oleh pengurus urusan jual beli, pembayaran dll, dan ketika ingin ada suksesi itu di lapis duanya tidak siap karena masih meras, kalau boso jowone “ kalah awu” dengan ketuanya jadi permasalahanya bukan di ini, tapi di internal mereka, di internal kepengurusan”

3. Persoalan terkait dengan kekompakan unit managemen hutan rakyat

Kondisi kelompok tani yang ada di kabupaten Gunung Kidul mengalami fluktuasi. Ada kalanya kelompok mempunyai semangat yang tinggi untuk mengembangkan kelompok tani. Namun ada kalanya semangat itu tiba-tiba luntur. Berbicara tentang dinamika kelpmok tani yang ada, ada dua faktor penyebab, yaitu fakor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terkait dengan etos kerja dan budaya kelompok tani. Faktor eksternal terkait dengan model pendampingan yang dilakukan oleh LSM. Seperti yang dituturkan oleh ST²⁴:

²³ Wawancara bulan Juni 2012

²⁴ Wawancara dengan ST, Juni 2012

"do males-malesan memeng kan terus mereka ngon budaya yo seng duwur. ada ada nek seng iki mau seng girisekar pancen seng neng Gunungkidul kaitane dengan etos mau wes ra mlaku, ketoke wes kehilangan semangat lah untuk itu go mlaku kita mbk

kondisi dampingan bedo, ha nek seng kui Dengok neng nek masalah pengetahuane yo, nek knowledge lo mbk kui akeh, nek seng masalah fisik orientasine es berbeda kui. kayake dua-duane mbak dua-duane berperan."

4. Persoalan terkait dengan tebang butuh

Fenomena tebang butuh yang diharapkan bisa terminimalisir ternyata dalam rentang waktu enam tahun (2006 -2012) belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Dalam aturan internal kelompok juga sudah diatur terkait dengan mekanisme penebangan kayu. Tapi, aturan dalam kelompok tersebut tiak bisa secara konsisten diterapkan. Fenomena ini terjadi karena ternyata produk-produk kayu hutan rakyat yang telah tersertifikasi belum memberikan nilai ekonomi secara lebih, sementara tingkat kebutuhan masyarakat makin meningkat. Seperti yang dituturkan oleh informan Srd²⁵

"duwene kayu ya kayu, neng padahal ya sudah sering di sampaikan pokok'e kayu itu alternative terakhir, kalau mau misalnya punya sapi, pitik, kambing, seng di anu, kambing'e sek apa juga sapine, tapi nek seng ra duwe sapi, ra duwe wedus, duwene kayu yo akhire kayune di jual juga"

5. Persoalan terkait dengan belum optimalnya dukungan kebijakan dari pemerintah kabupaten Gunung kidul

Dalam sertifikasi ada wadah Pokja (kelompok kerja) yang menghadirkan *multistakeholder* terkait dengan sertifikasi hutan rakyat. Adanya Pokja ini diharapkan bisa mendorong sertifikasi hutan rakyat di kabupaten Gunung Kidul bisa berjalan secara optimal. Namun sayangnya, Pokja tidak bisa berjalan secara optimal dan bisa dikatakan jalan di tempat. Kondisi ini disebabkan beberapa faktor seperti tidak adanya transformasi dari pejabat sebelumnya, tidak ada koordinasi di Pokja secara

²⁵ Wawancara dengan bapak Srd, Juni 2012

optimal dan sebagainya. Hal ini seperti yang dituturkan oleh informan dari dinas industri ²⁶... sebagai berikut:

"jadi begini jadi sudah di lakukan tergantung pada pokja kalau yang megang pokja itu orang kuat dia bisa mempengaruhi stekholder yang lain untuk terlibat secara langsung itu, contohnya ya tadi ada yang semacam, karena di pokja dulu almarhum itu angkat kuat, iya pak joko, inikan bisa ' e kamu skpd ini kamu tolong buat rencana untuk ini sesuai tugasmu, ada begitu da kami melakukan kegiatan itu . setelah bapak itu sedo sedikit fakum kayak gak punya yang di tokohkan yang mempunyai fisi ke depan yang bagus yang menguasai persoalan sehingga sedikit, tapi di sisi lain di luar pemerintah justru yang penting di pokja itukan suwasta, justru yang kita harapkan berulang kali adalah suwastanya itu di samping lsmnya itu yang paling penting sebetulnya karena dampak positif dari adanya kegiatan hutan rakyat lestari ini sebenarnya yang berperan penting itu ekonomi itu suastanya, ternyata swastanya dari 10 yang di harapkan terlibat, jadi biaya pengeluaran pokja itu di tanggung bersama pemerintah LSM dan swasta".

Persoalan-persoalan tersebut menjadikan kendala dalam upaya semangat menjaga nilai-nilai yang ada dalam sertifikasi hutan rakyat . Bisa dikatakan dalam rentang waktu enam tahun (2006 -2012) upaya mencapai apa yang ada dalam sertifikasi menjadi stagnan.

Penutup

Sertifikasi hutan rakyat di tiga unit manajemen hutan rakyat di kabupaten Gunung Kidul mempunyai dinamika sosial politik tersendiri . Hal ini terkait dengan kondisi karakteristik masing-masing desa. Faktor lain adalah perbedaan model pendampingan yang dilakukan oleh dua NGO (Lembaga ARUPA dan Yayasan Shorea) serta PKHR UGM serta dukungan kebijakan baik di level desa maupun Kabupaten. Berbicara dinamika sosial politik pra sertifikasi hutan rakyat yang terjadi di kabupaten Gunung Kidul mempunyai pengaruh yang signifikan dalam upaya menuju sertifikasi hutan rakyat. Sebelum adanya sertifikasi hutan rakyat ditemukan bahwa

²⁶ Wawancara dengan dinas Industri, April 2012

di masing-masing unit manajemen hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul ternyata secara institusional belum memiliki wadah yang secara serius mengurus keberlangsungan hutan rakyat secara profesional. Kondisi ini tentu saja berpengaruh dalam manajemen pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul. Pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan sebelum ada program sertifikasi lebih banyak mendasarkan pada manajemen tradisional dengan melibatkan unit sosial terkecil, yaitu keluarga. Dalam dinamika sosial politik setelah para petani hutan rakyat menerima sertifikasi hutan rakyat, banyak progres atau transformasi sosial yang terjadi dimasyarakat seperti adanya menguatannya kelembagaan lokal yang mengurus keberadaan hutan rakyat di kabupaten Gunung Kidul, makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting sertifikasi, adanya *networking* yang melibatkan berbagai *multistakeholder* (misalnya melalui adanya POKJA atau Kelompok Kerja) dan sebagainya. Namun demikian, tidak dinafikkkan bahwa di balik dinamika sosial politik tersebut ada berbagai persoalan yang terkait dengan pengelolaan hutan rakyat, seperti persoalan pemasaran produk kayu hasil sertifikasi, persoalan yang dihadapi oleh Koperasi Wana Manunggal Mandiri, kekompakan dalam kelompok tani di masing-masing unit management hutan rakyat serta adanya persoalan klasik yang ada di masyarakat Gunung kidul yaitu adanya fenomena tebang butuh pasca sertifikasi. Adanya persoalan ini tentu saja menjadi tanggungjawab berbagai pihak (*multistakeholder*) yang terkait dengan sertifikasi hutan rakyat. Adanya sinergitas yang kondusif dari berbagai pihak, persoalan yang ada dalam dinamika sosial politik pasca sertifikasi akan bisa terselesaikan.

Daftar Pustaka

- Amin, Samir. 2000. *Capitalism in the Age of Globalization*, New York, Zed Books
- Awang, San Afri. 2006. *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi: Konstruksi Sosial dan Perlawanan*, Yogyakarta, Debut Press
- _____ 2001, *Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan*, Debut Press,

Yogyakarta

- _____ 2007, *Managemen Hutan Rakyat : Proses Konstruksi Pengetahuan lokal*, Yogyakarta, Banyumili Art Network
- _____ 2002, *Hutan Rakyat, Sosial Ekonomi dan Pemasaran*, Yogyakarta, BPFE UGM
- _____ 2004, *Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan*, Yogyakarta, Bigraf Publishing
- _____ 2003, *Politik Kehutanan Masyarakat*, Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- _____ 2005, *Petani, Ekonomi dan Konservasi*, Yogyakarta , Debut Press
- Barratt Brown, Michael, *Models in Political Economy*, Penguin Economics, 1994
- Budiman, Arief, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Caporaso, Kames A dan David P Levine. 2008. *Teori Ekonomi Politik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Denzin, Norman K and Yvonna S Lincoln, 2009. *Hand book of Qualittaiive Research*, California, Sage Publication
- Giddens, Anthony. 1986. *Kapitalisme dan teori Sosial Modern*, Jakarta, UI Press
- Ikbar, Yanuar. 2006. *Ekonomi Politik Internasional (1)*, Bandung, PT Reflika Aditama
- Ikbar, Yanuar. 2006. *Ekonomi Politik Internasional (2)*, Bandung, PT Reflika Aditama
- Mas'ud, Mohtar. 2003. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan* , Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Mathew B Miles & AM Huberman, 1992, *Analisa data Kualitatif*, Jakarta, Penerbit UI
- Moleong, Lexy, 1993, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya
- Nugroho, Heru, 2001. *Negara, pasar dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Rachbini, Didik J. 2006. *Ekonomi Politik dan teori Pilihan publik*, Ghalia Indonesia, 2006, Bogor
- Ritzer, George, 2000. *Sosiological Theory*, McGraw Hill Higher

- Education
Scott, James C. 1981. *Moral Ekonomi Petani, Jakarta, LP3ES*
Simon, Hasanu. 2010. *Dinamika Hutan Rakyat di Indonesia, Yogyakarta, psutaka Pelajar*
Uphoff, Norman. 1986. *Local Institutionsl Development; An analytical Sourcebook with cases, Kumarian Press*
Wilber, Charles K, 1992. *The Political Economy of Development and Underdevelopment, Mc Graw Hill, Inc (fifth edition)*
Wilber, Charles K, 1983. *The Political Economy of Development and Underdevelopment, Pan American Copyright Convention (fifth edition)*

Makalah Dokumen

Awang, San Afri, 2006, *Peran Para Pihak Dalam Melestarikan Hutan Rakyat (Spesial Kasus Gunung Kidul)*, makalah dalam lokakarya Gunung Kidul , Wonosari, 14 Februari 2006

Data Base ARUPA, 2006

Buku I, Dokumen Pengajuan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) Unit Management Hutan Rakyat Desa Giri Sekar, Desa Dengok, Desa Kedung Keris , Kabupaten Gunung Kidul. Dokumen ini menjadi bagian penting Dalam pengajuan sertifikasi oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari Kabupaten Gunung Kidul yang diajukan pada PT TUV International Indonesia, Jakarta, Sepetember 2006

Info LEI, 2002, *Pilot project Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari dan Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari*

Gunung Kidul Dalam Angka, BPS 2012

Laporan Kelompok Kerja Hutan Rakyat Lestari Kabupaten Gunung Kidul, periode Januari - April 2006